

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SAPA	STATUS	NAMA SAPA	KODE SUB URUT	NAMA SUB URUT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DATA	NAMA SUMBER DATA	BENCAN	LABEL SUB KEGIATAN	
147	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0088	SD NEGERI 001 PANDAN SARI	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	305,566,584		
148	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0145	SD NEGERI 001 PUNAMA SARI	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	146,805,755		
149	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0034	SD NEGERI 001 SEI BENAR RANGKUN	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	120,523,342		
150	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0025	SD NEGERI 001 TANJUNG PERKATANG	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	124,852,172		
151	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0036	SD NEGERI 001 TUMBIT DAYAK	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	115,453,890		
152	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0089	SD NEGERI 001 PUNAN MAHAMUD	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,300,900		
153	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0144	SD NEGERI 001 EKA SAPTA	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	137,474,420		
154	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0052	SD NEGERI 001 SUKAN TENGAH	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	48,763,020		
155	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0090	SD NEGERI 001 PUNAN MALINAU	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	330,855,842		
156	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0051	SD NEGERI 001 SAMBALUNG	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	323,219,213		
157	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0050	SD NEGERI 001 SUKAN TENGAH	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	47,654,730		
158	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0091	SD NEGERI 001 SIKUDUNG TENGAH	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	364,388,190		
159	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0049	SD NEGERI 001 SAMBALUNG	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	118,749,839		
160	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0143	SD NEGERI 001 DUMAYANG	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	221,762,483		
161	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0048	SD NEGERI 001 TUMBIT DAYAK	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	94,264,422		
162	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0092	SD NEGERI 001 TEPAH LUKU	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	602,261,242		
163	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0046	SD NEGERI 001 SUKAN TENGAH	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	91,506,960		
164	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0118	SD NEGERI 001 BUYUNG-BUYUNG	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	299,678,122		
165	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0142	SD NEGERI 001 CAPLAK	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	175,398,515		
166	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0119	SD NEGERI 001 HARAPAN MAJU	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	250,100,640		
167	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0141	SD NEGERI 001 CAMPUR SARI	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	215,204,344		
168	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0140	SD NEGERI 001 BUMI JAYA	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	238,597,004		
169	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0120	SD NEGERI 001 SEMURUT	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	124,871,420		
170	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0124	SD NEGERI 001 SEMURUT	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	246,480,850		
171	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0121	SD NEGERI 001 TABALAN MAJURA	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	533,442,880		
172	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0122	SD NEGERI 001 TABALAN ULU	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,769,580		
173	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0125	SD NEGERI 002 BUYUNG-BUYUNG	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	303,133,020		
174	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0047	SD NEGERI 001 SEI BENAR RANGKUN	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	272,457,879		
175	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0123	SD NEGERI 001 TURABAN	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	372,001,800		
176	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0046	SD NEGERI 001 SAMBALUNG	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,608,676		
177	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0044	SD NEGERI 002 TUMBIT DAYAK	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	83,322,355		
178	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0041	SD NEGERI 002 SUKAN TENGAH	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	45,469,960		
179	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0042	SD NEGERI 001 SEI BENAR RANGKUN	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	115,627,056		
180	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0040	SD NEGERI 001 SAMBALUNG	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	319,735,700		
181	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0039	SD NEGERI 002 PESAYAN	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	126,620,900		
182	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0038	SD NEGERI 002 LONG LAMUK	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pembiayaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Dana Alokasi Umum (DAU)	131,841,406		
183	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0000	Dinas Pendidikan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.0.00.00.01.0037	SD NEGERI 002 GUMIRANG	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.02.00504	Pem					

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
924	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.02.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Nota	1.02.02.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
925	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.02.02	Pencapaian Keberhasilan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UMP dan UMD di Wilayah Kabupaten/Nota	1.02.03.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
926	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.02.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Nota	1.02.03.02.0001	Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
927	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.02.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
928	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.02.0006	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPOD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
929	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.02.0001	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
930	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.02.0002	Keuangan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
931	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.02.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
932	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.02.06002	Pemediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
933	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.02.06003	Pemediaan Peralatan Rumah Tangga	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
934	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.02.06005	Pemediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
935	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.02.06009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komnas SPOD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
936	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.02.070002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
937	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.02.070010	Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
938	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.08	Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.02.08002	Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
939	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.02.090001	Pemediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
940	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.02.090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lampu	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
941	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.02.090007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
942	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.02.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
943	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Dr. Abdul Rivali	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.02.01.02.13	Penataan Organisasi	1.02.01.02.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
944	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Nota	1.03.02.02.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
945	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Nota	1.03.02.02.01.0107	Pembangunan Upr Ar Bakau	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
946	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Nota	1.03.02.02.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	150,130,000,000	
947	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Nota	1.03.02.02.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
948	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.02.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Nota	1.03.02.02.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	57,110,000,000	
949	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.02.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Nota	1.03.02.02.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.2.02.02.1.2.01.08	Bantuan Keuangan, Dana Alokasi Umum (DAU)	91,430,000,000	
950	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.02.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Nota	1.03.02.02.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
951	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.02.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Nota	1.03.02.02.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
952	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Nota	1.03.03.02.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kolektibilitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000	
953	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Nota	1.03.03.02.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,800,000,000	
954	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Nota	1.03.03.02.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	94,826,136,000	
955	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Nota	1.03.03.02.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	32,000,000,000	
956	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Nota	1.03.03.02.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	700,000,000	
957	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Nota	1.03.03.02.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	177,650,000,000	
958	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERMAHAPAN REGIONAL	1.03.04.02.01	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Perumahan di Daerah Kabupaten/Nota	1.03.04.02.01.0010	Pembangunan TPA/TPS/PA/TPS/RS/TPS	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17,950,000,000	
959	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERMAHAPAN REGIONAL	1.03.04.02.01	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Perumahan di Daerah Kabupaten/Nota	1.03.04.02.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Perumahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,800,000,000	
960	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Nota	1.03.05.02.01.0036	Pengadaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,000,000,000	
961	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Nota	1.03.05.02.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
962	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.02.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Nota</						

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA SPO	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01	Pondasi dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rakas Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,998,600		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01	Pondasi dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rakas Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0010	Pondasi dan Verifikasi Cakupan Pemenuhan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,999,579		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rakas Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi kelompok yang Terkena Rakas Program Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)			
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Rakas Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	150,000,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.06	Penerbitan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	174,999,849		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.03.2.01	Penerbitan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,999,089		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.03.2.02	Pusat dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,999,425		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	749,999,761		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN KUMUH	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terjadinya Tumbat dan Berkenbangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,664,000,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Usaha Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	149,999,910		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Usaha Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Huni	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11,800,000,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Usaha Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	149,999,563		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Usaha Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Meningkatkan Fungsi Huni	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)			
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Usaha Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)			
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01	Usaha Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Pemeliharaan PSU Perumahan dari Peningkatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	74,999,147		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Pencapaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kecamatan/Kec	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kec	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,999,710		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.01	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,998,975		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.01	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,998,154		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.01	Pencapaian, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,134,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,312,410,157		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,870,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kependidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40,279,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	1.04.01.2.05.0011	Simulasi Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,993,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,998,520		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,966,680		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24,999,792		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,000,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koneksi SMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	175,000,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemertahan Daerah	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	498,810,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemertahan Daerah	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,500,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemertahan Daerah	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	124,999,800		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemertahan Daerah	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	230,410,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemertahan Daerah	1.04.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	165,000,000		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemertahan Daerah	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24,998,961		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKUMAN	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemertahan Daerah	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	219,999,840		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.0.00.0.00.01.0000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SETIA PERLUNGSUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENGINGATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Pengingatan Gangguan Ketertertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan ketertertaman dan Ketertiban Umum serta Perhubungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1,014,997,551		
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.01.0000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.0.00.0.00.01.0000	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SETIA PERLUNGSUNGAN MASYARAKAT	1.05.02	PROGRAM PENGINGATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01	Pengingatan Gangguan Ketertertaman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0004						

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WFO	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kepegawaiannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34,500,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.2.05.0009	Pondokan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0001	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,987,900	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0002	Pemediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	89,326,052	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0003	Pemediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,991,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0004	Pemediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54,850,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0005	Pemediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,999,550	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0006	Pemediaan Bahan Batacan dan Peralatan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,983,680	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0009	Pemylenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemernintah Daerah	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	423,000,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemernintah Daerah	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	388,122,236	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemernintah Daerah	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	63,118,154	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemernintah Daerah	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.08	Pemediaan Jasa Pemungut Urusan Pemernintahan Daerah	1.06.01.2.08.0001	Pemediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,496,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.08	Pemediaan Jasa Pemungut Urusan Pemernintahan Daerah	1.06.01.2.08.0002	Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	156,997,800	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.08	Pemediaan Jasa Pemungut Urusan Pemernintahan Daerah	1.06.01.2.08.0004	Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	517,600,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemernintahan Daerah	1.06.01.2.09.0002	Pemediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	140,000,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemernintahan Daerah	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	19,880,000	
###	2025	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemernintahan Daerah	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemdukun Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	195,600,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02	PROGRAM PENENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02	PROGRAM PENENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01.0003	Facilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Kerja Berdasarkan Kaster Kompetensi	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,399,999,270	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49,999,600	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.02	Pembinaan LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48,999,477	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.2.03.0001	Pemediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79,999,182	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49,999,650	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59,997,816	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0001	Pemediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0003	Pemyluhan dan Bimbingan jabatan bagi Pencari Kerja	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0004	Pemylenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kersmapatan Kerja	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199,999,540	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.02	Pemribitan Izin Lembaga Pemempatan Tenaga Kerja Swasta (LPKKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPKKS	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Pemediaan Informasi Pasar Kerja Online	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	115,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0003	Jab Fias/Bursa Kerja	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	225,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PEMEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (P) dan Purna Pemempatan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.0002	Pemediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01	Pengolahan Peraturan Perencanaan dan Pendaftaran Perijinan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0001	Pengolahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	134,999,900	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01	Pengolahan Peraturan Perencanaan dan Pendaftaran Perijinan Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0003	Pemylenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengawasan	1.1,2.2.01.07.03.0001	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DBH Sawit	2,179,999,583	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02	Pengagaan dan Pemeliharaan Perizinan Hubungan Industrial, Mogak Kerja dan Pendaftaran Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0001	Pengagaan Perizinan Hubungan Industrial Mogak Kerja, dan Pendaftaran Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kependidikan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	179,999,780	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02	Pengagaan dan Pemeliharaan Perizinan Hubungan Industrial, Mogak Kerja dan Pendaftaran Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2					

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SFPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02	Perencanaan Kerawanan Pangan Kewilayahan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	319,407,800	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02	Pelaksanaan Kerawanan Pangan Kewilayahan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	421,967,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	138,129,552	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengkajian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,170,177,985	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0009	Pengaturan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	238,239,755	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	165,200,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,257,768,030	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	159,160,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.050.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	90,604,891	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	65,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.050.0.00.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	175,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	125,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	108,347,900	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	204,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	231,500,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pangan	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utang Pemeliharaan Daerah	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Retrofitting Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.04	PROGRAM PENELESTIAHAN SENGKETA TANAH GASAPAN	2.10.04.2.01	Pemeliharaan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Pemeclesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74,467,888	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.04	PROGRAM PENELESTIAHAN SENGKETA TANAH GASAPAN	2.10.04.2.01	Pemeliharaan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0005	Identifikasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248,76,414	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.05	PROGRAM PENELESTIAHAN SENGKETA TANAH GASAPAN	2.10.05.2.01	Pemeliharaan Masalah Ganti Kerugian dan Sertunan Tanah untuk Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.0001	Pemetaan Daftar Maparakat Pemetaan Sertunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99,268,825	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.05	PROGRAM PENELESTIAHAN SENGKETA TANAH GASAPAN	2.10.05.2.01	Pemeliharaan Masalah Ganti Kerugian dan Sertunan Tanah untuk Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.0002	Konfirmasi dan Penyelesaian Pemeclesaian Masalah Ganti Kerugian dan Sertunan Tanah untuk Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,467,500,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01	Pemeliharaan Objek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0002	Identifikasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99,509,710	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01	Pemeliharaan Objek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Tugas Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74,438,505	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01	Pemeliharaan Objek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0008	Identifikasi Subjek Redistribusi Tanah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149,291,930	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.09	PROGRAM PENGELAAAN IZIN MEMBUKA TANAH	2.10.09.2.01	Pemeliharaan Izin Membuka Tanah	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22,418,021	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.10	PROGRAM PENATAKUALAN TANAH	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hampiran pada satu Daerah Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149,241,100	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.10	PROGRAM PENATAKUALAN TANAH	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hampiran pada satu Daerah Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Mula Tanah Kewaspadaan Kabupaten/Kota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199,260,320	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.10	PROGRAM PENATAKUALAN TANAH	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hampiran pada satu Daerah Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kondisi Tanah Kabupaten/Kota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119,623,900	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98,413,682	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40,867,499	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.00.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.											

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WFO	NAMA SPO	KODE SUB UNIT	NAMA SUB URUN	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	NAMA LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.10.01.2.06.0001	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Peningkatan Bangunan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,998,835	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.10.01.2.06.0002	Pemediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199,988,340	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.10.01.2.06.0003	Pemediaan Perlatan Rumah Tinggal	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6,985,221	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.10.01.2.06.0004	Pemediaan Bahan Logistik Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	42,215,546	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.10.01.2.06.0005	Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7,491,858	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.10.01.2.06.0006	Pemediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.10.01.2.06.0009	Pemeliharaan Rujat Koordinat dan Konstruksi SPO	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.10.01.2.06.0010	Pemataatan Arifit Dinamis pada SPO	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.10.01.2.06.0011	Dukungan Peltakaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPO	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48,981,991	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.10.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24,930,331	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22,384,991	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.08	Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.10.01.2.08.0001	Pemediaan Jasa Surat Menyurat	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,150,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.08	Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.10.01.2.08.0002	Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124,997,200	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.10.01.2.09.0001	Pemediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124,894,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.10.01.2.09.0002	Pemediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.10.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10.0.0.0.0.01.0000	Dinas Pertanahan	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.10.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rahabltas Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48,500,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02	PROGRAM PENENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.01	Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPH) Kabupaten/Nota	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPH Kabupaten/Nota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	149,860,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02	PROGRAM PENENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02	Pemeliharaan Rujat Koordinat dan Konstruksi SPO	2.11.02.2.02.0005	Pemeliharaan Rujat Koordinat dan Konstruksi SPO	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	432,540,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Seleronikasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	138,739,561	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Seleronikasi dan Pelaksanaan Pencegahan Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	224,360,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	194,345,405	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,105,106,413	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.02	Peninggalan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	204,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.02	Peninggalan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	140,969,600	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	244,299,206	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	109,029,390	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03	PROGRAM PENGELOLAAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Nota	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	126,025,518	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Nota	2.11.04.2.01.0001	Kordinasi dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Nota	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6,347,340,655	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Nota	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,267,761,644	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05	PROGRAM PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BBB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)	2.11.05.2.01	Pemindahan sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Peraturan Administrasi dan Teknik Pemindahan sementara Limbah B3	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	401,213,600	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06	PROGRAM PEMBIKINAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ZIN LINGKUNGAN DAN ZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01	Pembiinan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	2.11.06.2.01.0001	fasilitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	139,786,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06	PROGRAM PEMBIKINAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ZIN LINGKUNGAN DAN ZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01	Pembiinan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Benuhat atau Peraturan Pemerintah terkait Peraturan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH Kabupaten/Nota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	151,009,596	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01	Pemeliharaan Rujat Koordinat dan Konstruksi SPO	2.11.08.2.01.0002	Pemeliharaan Rujat Koordinat dan Konstruksi SPO	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	207,970,202	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.0.0.0.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01	Pemeliharaan Rujat Koordinat dan Konstruksi SPO	2.11.08.2.01.0003	Pemeliharaan Rujat Koordinat dan Konstruksi SPO	1.1.1.2.01.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),Dana Alokasi Umum (DAU)	197,189,411	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SPMO	NAMA SPMO	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RENCAN	LABEL SUB KEGIATAN
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0012	Pengurangan sampah melalui pengangkutan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8,719,316,124	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	749,999,884	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,981,326	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPMO	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,862,632	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,170,088	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,200,408,821	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	298,688,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.0002	Pengadaan Pakikan Dinas beserta Atribut Kelengkapanannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54,600,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	151,000,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,999,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	104,999,469	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	69,476,178	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,997,467	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komititas SPMO	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	450,000,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21,000,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,933,114	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Survei Menjurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,999,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	284,952,380	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,858,881,049	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	925,000,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29,570,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01	PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39,996,680	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Kertan Administrasi Kependudukan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	99,996,717	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0004	Penyediaan Penduduk Non Permanen dan Kertan Administrasi Kependudukan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	119,982,009	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0005	Penyediaan Penduduk Non Permanen dan Kertan Administrasi Kependudukan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	84,977,232	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	2.12.02.2.04	Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.0002	Pembinan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	49,976,006	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	2.12.02.2.04	Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	149,998,006	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbatan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	79,970,959	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Penyediaan dan Pelayanan Pencatatan Sipil	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	99,995,129	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02	Penyenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	79,999,674	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.03	Pembinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengingat Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Bergama Islam dalam rangka Pembinaan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	89,999,674	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemertan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0001	Penguthaan dan Penyajian Data Kependudukan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	99,961,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemertan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0002	Terjaga Sama Pemertan Data Kependudukan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	89,968,736	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN	2.12.04.2.03	Penyenggaraan Pengandaian Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0004	Penyenggaraan Pemertan Data Kependudukan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	49,893,000	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN	2.12.04.2.03	Penyenggaraan Pengandaian Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0005	Sosialisai Terkait Pengandaian Informasi Administrasi Kependudukan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	49,947,552	
100	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</																

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.0010	Sosialisai Peraturan Perundang Undangan				
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.0011	Simulasi Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49,500,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,902,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		181,877,586
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,987,913
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		139,987,500
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6,999,710
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bata dan Perlatan Perundang-undangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4,000,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		205,000,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Perangut Utusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,988,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		173,794,799
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Perangut Utusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7,880,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Perangut Utusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		415,200,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.09.0001	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		54,995,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95,000,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37,487,804
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.30.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.30.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Nota	2.30.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48,988,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.30.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.30.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Nota	2.30.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39,997,594
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.30.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.30.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Nota	2.30.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		53,602,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.30.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.30.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Nota	2.30.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		99,670,388
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.30.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.30.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Nota	2.30.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25,077,600
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERENCANAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Perencanaan untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		66,294,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERENCANAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Perencanaan untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Keabsahan dan Pengalangan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		93,524,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERENCANAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Perencanaan untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Nota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERENCANAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Perencanaan untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERENCANAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.02	Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Nota	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Nota	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49,999,780
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.2.01	Pemantauan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Nota	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Nota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		444,586,780
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05	PROGRAM PERDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Nota	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		95,405,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06	PROGRAM PEMERBAIKAN DAN PERLUNGUAN KOPERASI	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Nota	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Nota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		199,999,648
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMERBAIKAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Ditakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Keperngatan	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		82,499,803
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMERBAIKAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Ditakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Keperngatan	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Penguatan Usaha Mikro	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		124,999,676
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMERBAIKAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Ditakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Keperngatan	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinergisasi dengan Para Pemangku Keperngatan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		75,000,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07	PROGRAM PEMERBAIKAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Ditakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Keperngatan	2.17.07.2.01.0010	Pendampingan dan Bantuan Hukum Bagi Usaha Mikro	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		250,000,000
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Oriental Peningkatan Rata Usaha Mengadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,248,995,961
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		149,999,650
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.31.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Per												

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA SPO	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	2.17.01.2.05.0011	Bindungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Indukstri Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	266,295,959	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,499,928	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	61,495,450	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,999,846	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SPO	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	250,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	249,999,900	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,999,724	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	125,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	65,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.02	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENDAPATAN PERAGANGAN	3.30.02.2.02	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	79,999,595	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERAGANGAN	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001	Pemeliharaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	162,808,600	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERAGANGAN	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0002	Facilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	457,518,134	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERAGANGAN	3.30.03.2.02	Pembiayaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Majarakat di Wilayah Kecamatan	3.30.03.2.02.0001	Pembiayaan dan Pengembangan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,499,995,600	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01	Manajemen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	79,999,776	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01	Manajemen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	421,306,167	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02	Pengawasan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	129,399,830	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Berbasis di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Berbasis di	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	76,430,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01	Pemeringkatan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Milu Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 3 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0004	Milu Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,999,999	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01	Pemeringkatan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Milu Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar pada 3 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75,859,949	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PENINGKATAN KUALITAS	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tera, Tera Jujur, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tera, Tera Jujur	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	304,678,689	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PENINGKATAN KUALITAS	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tera, Tera Jujur, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.0002	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berapa Tera, Tera Jujur, dan Pengawasan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	215,603,933	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERAGANGAN	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PENENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Promosi dan Inovasi Industri	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	868,148,233	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PENENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,871,907,699	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02	PROGRAM PENENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,399,023,758	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04	PROGRAM PENGUJILAHAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk UI, PPI, UIK dan PPI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.0001	Facilitas Pengembangan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kuesioner Industri serta Data Lanjutan Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SI IN)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	894,830,905	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04	PROGRAM PENGUJILAHAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk UI, PPI, UIK dan PPI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.0002	Diagnosis, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SI IN)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,218,153	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJIAN	2.17.3.3.1.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	2.17.3.3.1.3.30.01.0000	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18	URUSAN PENANAMAN MODAL	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KUM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01	Pengaturan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Mengaji Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.0003	Facilitas Kemudahan yang dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2															

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA SPO	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perincian dan Non Perincian yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.0002	Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Informasi Perincian Berbasis Sistem Pelayanan Perincian Berbasis Terintegrasi secara Elektronik	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	219,993,748	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SPMO	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,999,501	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	55,173,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,994,280,934	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	212,429,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakuan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.0011	Bindegan Teks implementasi Peraturan Perundang-undangan	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	125,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Intisiasi	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,702,578	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	166,348,828	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	64,999,464	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	58,999,520	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0009	Pengelolaan Rapor Koordinasi dan Komunikasi SPMO	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.07	Pengaturan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,484,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	164,998,800	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	524,600,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	209,941,400	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18,900,000	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18.0.0.0.0.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.201.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,998,920	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEPEMUDUAN	2.19.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149,999,106	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEPEMUDUAN	2.19.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/Kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99,999,117	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEPEMUDUAN	2.19.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249,999,930	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEPEMUDUAN	2.19.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149,998,708	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEPEMUDUAN	2.19.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemudaan Pemuda bagi Pemuda Pelajar Tingkat Kabupaten/Kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	199,999,421	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEPEMUDUAN	2.19.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51,989,665	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEPEMUDUAN	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis pengakuan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	349,996,347	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEOLAHARAGAN	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi pada tingkat Pendidikan yang Mengaji kewirausahaan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengandaan, pemeliharaan, dan pengembangan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,599,995,874	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEOLAHARAGAN	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat kabupaten/kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	999,998,288	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEOLAHARAGAN	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpih Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta kejuaraan Olahraga Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	999,995,830	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEOLAHARAGAN	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0006	Kebudayaan anggotanya kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	999,993,759	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEOLAHARAGAN	2.19.03.2.03	Pemilihan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	168,288,143	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEOLAHARAGAN	2.19.03.2.03	Pemilihan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	935,998,270	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEOLAHARAGAN	2.19.03.2.03	Pemilihan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0008	Pemataan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan (Sport Science)	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69,994,690	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEOLAHARAGAN	2.19.03.2.03	Pemilihan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga cawanan kompetisi keolahragaan	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,699,992,368	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDUAN DAN OLARAHGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANGK KEOLAHARAGAN	2.19.03.2.03	Pemilihan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0010	pemberitahuan dan Pemetaan dalam data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	2.201.08	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99,995,421	
###	2025	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.0.0.0.01.0000	Dinas Keperumudan dan Olahraga	2.19.0.0.0.0.01.0000	D												

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SPO	NAMA SPO	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.01.0004	Pemediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.331,306,820	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02	Pembayaran Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	388,757,913	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Penangkapan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Penangkapan Ikan (TPI)	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	383,933,402	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.05	Perbaikan Izin Pengadaan Kapal Perangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Urutan sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.05.0001	Penetapan Peraturan dan Prosedur Pemetaan Persebaran Pengadaan Kapal Perangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Urutan sampai dengan 10 GT	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	134,996,805	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02	Pembayaran Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	320,355,966	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembiudayaan Ikan	3.25.04.2.04.0002	Pemetaan Prasana Pembiudayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	639,918,217	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembiudayaan Ikan	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kuantitas Ikan dan Pengukuran Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	134,004,720	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembiudayaan Ikan	3.25.04.2.04.0009	Pemetaan Ketersediaan Sarana Pembiudayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,386,501,137	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembiudayaan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,997,776	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha perangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	184,998,400	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.01	Perbaikan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemastian dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	227,475,597	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02	Pembiayaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasarkan Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.0002	Pembiayaan terhadap Penerapan Peryaratan Perizin Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasarkan Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	176,512,728	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.03	Pembiayaan dan Pemastian Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0002	Pembiayaan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	795,586,628	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	139,979,346	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,999,614	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,300,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6,805,813,405	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	144,420,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Akibat Kelangkaannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	45,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	67,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,394,340	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	160,608,407	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,940,078	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	43,513,590	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6,499,904	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.25.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konultasi SMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	401,360,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,496,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	134,998,700	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	411,725,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	120,164,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,940,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	219,972,400	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,499,896	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,114,999,632	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0002	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	268,796,423	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,319,896,303	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.02.0003	Pemeliharaan SDO Hewan/Tanaman	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,824,996,476	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJUHAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.02	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.02.00					

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SFPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	114,998,660	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Uluati Tani	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	264,977,100	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Petak Hewan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	548,895,855	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01	Pengimanan Kesehatan Hewan, Pemutlakan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 tahun Daerah Kabupaten/Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	274,999,134	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.03	Pengendalian Penyakit dan Laboratorium di Jasa Medis Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medis Veteriner	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	862,199,544	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	178,999,240	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,994,038,500	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Ushaynya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	124,938,199	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Ushaynya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.06.2.01.0005	Pembaraan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	154,886,330	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001	Pengiklutan Kapasitas Kelenbagan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.2.01.08, 2.2.02.02.01.0001	Dana Alokasi Umum (DAU), Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	910,255,528	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,009,999,985	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	98,970,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,999,337	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	165,199,396	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	23,911,481,075	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	178,060,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaran Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	114,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.27.01.2.05.0011	Binidngan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pengkangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,931,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,998,125	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,905,900	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,990,460	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0005	Pengadaan Barang Cetaklkan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,999,600	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	150,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	356,161,068	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	86,968,752	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	469,641,801	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,498,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	409,900,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,072,542,216	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	120,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,780,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	124,975,700	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	727,111,320	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0002	Peningkatan Kualitas SDO Hewan/Tanaman	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	112,305,180	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PULHIAN	3.27.0.00.0.00.02.00															

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SPO	NAMA SPO	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	740,188,824	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani & Kecamatan dan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	595,625,568	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0003	Pemeydaan dan Pemertabatan Sarana dan Peralatan Penyuluhan Pertanian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	178,466,255	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0005	Pemberitahuan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Kelompok Tani Target Kabupaten/ Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	453,501,902	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	499,948,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,999,759	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	650,171,340	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0001	Pemeydaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9,386,970,395	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.27.01.2.02.0002	Pemeydaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	757,570,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0001	Pemeydaan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,603,720	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0002	Pemeydaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	147,822,037	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0004	Pemeydaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	62,847,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0005	Pemeydaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10,836,110	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0006	Pemeydaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0007	Pemeydaan Bahan/Material	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	8,539,354	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.27.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	557,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.08	Pemeydaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0001	Pemeydaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,988,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.08	Pemeydaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.08.0002	Pemeydaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,591,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0002	Pemeydaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pojok dan Perlengkapan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	115,000,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	16,950,000	
###	2025	3	URUSAN PEMERINTAHAN PUJAHAN	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	244,862,000	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001	Manajemen Administrasi Pemerintahan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,468,823,522	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,426,765,500	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0003	Fasilitas Pelaksanaan Operasi Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	863,639,668	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0001	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31,628,731,200	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,000,000,000	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10,148,999,979	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0001	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	664,931,469	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002	Fasilitas Bantuan Hukum	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	949,915,580	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0003	Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,347,005,754	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.04	Fasilitas Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.0001	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	599,961,950	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.04	Fasilitas Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	349,984,900	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Seleksi, dan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BUMD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	569,999,877	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0002	Pengembangan dan Distribusi Perekonomian	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280,000,000	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149,999,676	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0001	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	782,999,898	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	675,687,118	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	718,961,440	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,463,105,100	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,230,290,255	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0003	Pembelian dan Alokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,014,109,222	
###	2025	4	UNSUB PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.													

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SFPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kelembagaan Rakyat				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tidak Langsung Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Self Audit Pemirsa Keuangan				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		94,320,985
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		96,224,794
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0002	Pendidikan Tugas DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,053,371,880
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0004	Pemediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		240,096,782
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0005	Pemediaan Tenaga Ahli Fraksi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		450,098,511
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0006	Pemeliharaan Hubungan Masyarakat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		246,047,694
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0007	Pemilihan Program Kerja DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		136,153,328
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		9,808,061,235
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		870,421,320
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.0002	Pemilihan Pokok Pokok Pikiran DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		59,742,710
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.0003	Nilakanan Reses	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,717,728,286
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.0004	Solusiasi Rancangan Peraturan Daerah				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06.0001	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		598,637,790
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	4.02.02.2.07.0001	Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Penetupahan Kerja Sama Daerah				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Facilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		8,767,852,560
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Facilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Facilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0003	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,844,776,970
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Facilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0004	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,637,790,770
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08	Facilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0005	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		149,908,156
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		79,908,130
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0001	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		7,444,133,038
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0002	Pemediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		464,325,778
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SFPD				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		74,905,602
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		49,871,812
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kehendakannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		273,060,000
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		704,919,825
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		99,987,000
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0001	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		121,185,808
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0002	Pemediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		399,729,267
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0003	Pemediaan Perlatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		789,766,900
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0004	Pemediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		429,863,000
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0005	Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		154,534,045
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0006	Pemediaan Bahan Bataca dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		500,382,819
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Musyawarah SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		340,630,000
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Aritp Dinamis pada SFPD				
###	2025	4	UNSR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.0.0.0.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02	SEKRETARIAT DPRD	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	4.02.01.2.07							

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA SPO	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	639,300,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.09.0001	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	249,520,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,798,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sirkulasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	399,999,930	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,050,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Pengawasan Kelengkapan Pajak Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0003	Penyediaan dan Penyerahan Kelengkapan Pajak Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	449,999,525	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	313,668,913	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0006	Penyediaan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	475,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Besi Perumahan Hak Jata Tanah dan Bangunan (BPTN)	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	754,999,444	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0008	Pemetaan Wajik Pajak Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	149,999,496	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	155,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0011	Penghasilan Pajak Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	886,311,087	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0013	Pengembangan, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	349,998,636	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0014	Pembarisan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SMD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	410,200,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10,395,824,882	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	244,400,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.05	Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Akibat Kelengkapan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.05	Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.0011	Simbolisasi Teksilis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	265,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0009	Penyediaan Rujukan Koordinasi dan Komunikasi SMD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	502,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,172,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	349,999,300	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	520,550,644	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemeliharaan Daerah	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02	KEUANGAN	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.02.01.2.11	Peraturan Organisasi	5.02.01.2.11.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan TATA Laksana	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150,000,000	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.1.04.0.0.01.01.0000	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.1.04.0.0.01.01.0000	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kependidikan ASN	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kelembagaan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	119,994,653	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.1.04.0.0.01.01.0000	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.1.04.0.0.01.01.0000	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kependidikan ASN	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	481,998,155	
###	2025	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.1.04.0.0.01.01.0000	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.1.04.0.0.01.01.0000	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemeliharaan dan Informasi Kependidikan ASN	5.03.02.2.01.0006	Kelembagaan Pelaksanaan Administrasi Pemeliharaan	1.2.01.08	Dana Alok		

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SFPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04	Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0009	Pelaksanaan Proses Izin Penceraian Pegawai	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		57,999,676
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.01	Penencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		99,999,370
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.01	Penencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		49,999,319
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.01	Penencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		130,193,903
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		8,544,212,356
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,468,300,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.01	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyaluran/Verifikasi Keuangan SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		599,740,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		60,000,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0011	Rimbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		50,000,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		9,986,540
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		99,995,080
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.01	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		17,345,231
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		49,994,700
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		9,999,158
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralatan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		50,000,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		200,000,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.01	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		46,000,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,000,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,000,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,000,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		124,999,800
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		39,998,649
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		29,990,868
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		99,999,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03	KEPEGAWAIAN	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		200,000,000
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Akreditasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Nota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		649,919,348
###	2025	5	UNJUK PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Akreditasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi jabatan Fungsional, Kepemerintahan, dan Pejabat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		6,999,954,748
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		299,999,680
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0001	Revisi Laporan Kinerja	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		219,899,020
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		129,973,654
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,399,895,890
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		374,450,220
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		773,995,115
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelidikan Kelangkaan Negeri/daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		99,978,030
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,649,994,991
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PENGUKURAN KEBERAKAN, PENAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.01	Pemantauan Ketepatan Teknis di Bidang Pengawasan dan Asistensi Pengawasan	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Asistensi Pengawasan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		219,979,207
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PENGUKURAN KEBERAKAN, PENAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pemantauan dan Asistensi Pengawasan	6.01.03.2.02.0001	Pemantauan dan Asistensi Pengawasan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,258,204,971
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PENGUKURAN KEBERAKAN, PENAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pemantauan dan Asistensi Pengawasan	6.01.03.2.02.0002	Pemantauan, Asistensi, Verifikasi, dan Pengujian Reformasi Birokrasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		324,875,040
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PENGUKURAN KEBERAKAN, PENAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pemantauan dan Asistensi Pengawasan	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		499,986,974
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03	PROGRAM PENGUKURAN KEBERAKAN, PENAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02	Pemantauan dan Asistensi Pengawasan	6.01.03.2.02.0004	Pemantauan, Asistensi dan Verifikasi Pengadaan Logistik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		599,996,656
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.01	Penencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		124,949,389
###	2025	6	UNJUK PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01									

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA WPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11,878,864	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	250,000,000	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Upasan Pemernitah Daerah	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	350,000,000	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Upasan Pemernitah Daerah	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46,000,000	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Upasan Pemernitahan Daerah	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,780,000	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Upasan Pemernitahan Daerah	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,990,600	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Upasan Pemernitahan Daerah	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	214,750,000	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Upasan Pemernitahan Daerah	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	400,000,000	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Upasan Pemernitahan Daerah	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30,000,000	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Upasan Pemernitahan Daerah	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,991,700	
###	2025	6	UNSUR PENGANGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Upasan Pemernitahan Daerah	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12,384,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELANGKARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertintahan & Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Penyediaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	255,968,505	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELANGKARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah <i>sewa Ada di Kecamatan</i>	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	39,998,232	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	199,648,641	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	69,999,257	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,954,785	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	4,199,984,892	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Sungai Bedugun	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1,891,028,697	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Gayam	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	2,134,968,928	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Bagis	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	2,389,831,969	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0005	Kelurahan Gunung Panjang	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	1,574,986,626	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0006	Kelurahan Karang Ambun	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	2,450,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesiadaan Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETERTAMAN DAN KETERIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keteriban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	199,997,570	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELANGKARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Peraturan dan Keatutan Bangsa	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	94,995,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Keteriban Umum	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	24,997,024	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,999,538	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	49,999,881	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	130,199,740	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	10,576,802,702	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	335,360,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kehelapaan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	28,987,644	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengaturan Administrasi Kepegawaian	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	10,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pengendalian Bangunan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	9,991,136	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	74,995,552	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	9,999,514	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	124,999,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	7,999,472	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	5,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.1	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	85,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7													

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE RPMD	NAMA RPMD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.0.0.0.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1	PENDAPATAN ASPI DAERAH (PAD)	89,967,530	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01.0.0.0.0.01.0000	Kecamatan Tanjung Redeb	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASPI DAERAH (PAD)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29,995,759	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39,993,300	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	473,648,069	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,749,984,700	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	85,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0001	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,155,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETETRAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39,975,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembaruan Peraturan dan Keistiaan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	564,975,600	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyediaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,999,345	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,887,466	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24,964,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	69,999,386	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja RPMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,693,504	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,891,275,516	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	162,642,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	52,776,528	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Persediaan dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	80,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,096,725	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30,666,379	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,998,773	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	74,960,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6,987,132	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	85,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24,990,600	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	74,943,590	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	58,863,300	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,996,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	59,999,500	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,998,068	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	484,204,350	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	74,991,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01.0.0.0.0.02.0000	Kecamatan Gunung Tabur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29,999,689	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,999,944	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	261,518,407	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.1.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	84,999,596	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.03.0000	Kecamatan Sambailung	7.01.0.0.0.0.03.0001	Kelurahan sambailung	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,622,176,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAY																

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA WPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Facilitas Pelaksanaan Pemihitan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	48,999,770	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Facilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	48,999,788	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	65,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,044,881,114	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Pemediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	485,750,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	185,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Keengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	58,080,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	91,500,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,999,615	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Pemediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	41,999,748	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Pemediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,992,157	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Pemediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	94,200,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Pemediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,999,972	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Pemediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,200,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mobil	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	28,988,468	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,014,463	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,999,159	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Pemediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,500,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Pemediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	91,638,600	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Pemediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Pemediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Pemediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	90,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,900,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Sambaling	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24,992,130	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Energi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39,999,330	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Didukung oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39,999,677	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	17,499,920	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Stimulasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Didukung oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	210,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	349,999,511	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0001	KELUAHAN TELUK BAYUR DESA DAN KELURAHAN	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,810,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0002	KELUAHAN RINDING DESA DAN KELURAHAN	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,670,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26,500,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETERTAMBAH DAN KETERTIBAAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kegiatan Negara Republik Indonesia, Tataran Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	42,995,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Peningkatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perencanaan Khusus Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembiaran Peraturan dan Kelembagaan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	94,998,760	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,500,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Asst Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	94,999,305	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Facilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan keterlibatan Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,999,220	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	84,999,700	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alok		

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SFPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,999,795	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Bersesta Akibat Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	21,450,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	55,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,992,558	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11,168,982	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	89,998,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10,999,850	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,995,682	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komutasi SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	60,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	652,303,305	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,920,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	13,995,538	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	77,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	247,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	82,983,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01.0.0.0.0.04.0000	Kecamatan Teluk Bayur	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	110,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibebankan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0002	Facilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditempatkan di Kecamatan	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditempatkan di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Penyusunan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	65,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Saluran Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Disalurkan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	617,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	165,560,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54,999,780	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PERENCANAAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perencanaan Rencana Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Peraturan dan Kesatuan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	580,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PERENCANAAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perencanaan Rencana Daerah	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	170,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Facilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,200,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,144,242,933	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengupah/Verifikasi Keuangan SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	74,999,400	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44,999,100	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Bersesta Akibat Kelengkapannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	60,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,995,140	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44,998,781	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	38,114,821	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN</										

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SFPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.1.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29,961,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.1.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	69,342,406	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,500,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	69,965,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	24,630,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	352,898,200	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perpinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	153,250,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01.0.0.0.0.05.0000	Kecamatan Segah	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	80,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	69,999,970	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	151,966,400	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	170,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETETRAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0003	Membarani Peraturan dan Peraturan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	175,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0008	Melaksanakan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0002	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	25,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0003	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	155,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0011	Facilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	100,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,200,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,454,815,382	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pemeliharaan/Verifikasi Keuangan SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44,450,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	60,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,983,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44,984,506	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	119,956,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39,996,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	140,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,149,821	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,500,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,980,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29,580,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	239,732,675	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perpinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01.0.0.0.0.06.0000	Kecamatan Kelay	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.0.0.0.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.0.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah atau Aspek di Kecamatan	7.01.02.0.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	132,499,210	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.0.0.0.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.0.0.0.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01							

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SFPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Prosedur Kerja Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Peraturan dan Kelembagaan Bangsa	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		180,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		91,750,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Facilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Facilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130,200,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		2,942,347,349
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		95,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengalokasian Anggaran SKPD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37,500,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24,500,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		87,700,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,500,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		397,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Survei Menyusut	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,500,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlempapan Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		357,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		21,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Pulau Derawan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Diserj Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		35,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		30,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah atau Ades Kecamatan	7.01.02.2.02.0002	Facilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		39,999,560
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah atau Ades Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		89,999,630
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah atau Ades Kecamatan	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Diampunkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		40,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterteraman dan Keterlibatan Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepastian Negara Republik Indonesia, Tentera Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		40,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Prosedur Kerja Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Peraturan dan Kelembagaan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		175,186,215
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Prosedur Kerja Daerah	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		35,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Facilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		120,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Facilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		39,999,298
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Facilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		24,982,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0016	Facilitas Penyusunan Program				

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA WPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		49,999,736
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		130,620,500
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,431,932,128
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.01	KECAMATAN	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Administrasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02.0002	Pembiayaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyaluran/Verifikasi Keuangan SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		119,999,080
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		30,016,520
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		49,932,900
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		50,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Pembiayaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,999,440
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Pembiayaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		40,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Pembiayaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,991,100
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Pembiayaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		150,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Pembiayaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		7,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.01	KECAMATAN	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Pembiayaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		4,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0007	Pembiayaan Bahan/Material	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		29,988,904
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		70,450,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komutasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		80,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		23,680,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		44,120,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		10,007,760
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		139,671,545
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.01	KECAMATAN	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Pembiayaan Jasa Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.08.0001	Pembiayaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Pembiayaan Jasa Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.08.0002	Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		90,014,800
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Pembiayaan Jasa Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.08.0003	Pembiayaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		20,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Pembiayaan Jasa Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.08.0004	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		251,725,280
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.09.0002	Pembiayaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		134,900,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		35,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01.0.0.0.0.08.0000	Kecamatan Tallayan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemernintah Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		75,258,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		15,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBIYDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		15,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBIYDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		300,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBIYDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		134,932,544
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		39,992,454
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemanggun Kipada Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembiayaan Persiapan dan Keratan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		124,978,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemanggun Kipada Daerah	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		21,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembiayaan dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		60,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembiayaan dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		100,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembiayaan dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembiayaan dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan tertibtan Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		11,974,200
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		99,991,667
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01.0.0.0.0.09.0000	Kecamatan Bida Bida	7.01	KECAMATAN	7.01.01</									

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE WPD	NAMA WPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	NAMA SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	69,986,108	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pondasi dan Penghalangan Administrasi Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	6,939,524	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	365,350,814	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11,964,922	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	174,981,310	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,999,590	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komnitas SPO	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	65,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemertahan Daerah	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemertahan Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39,976,540	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemertahan Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	327,378,688	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Unsur Pemertahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Unsur Pemertahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33,587,024	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Unsur Pemertahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlingkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	11,999,544	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemertahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	114,921,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemertahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Biduk Biduk	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Unsur Pemertahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0002	Facilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	352,964,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETETRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Terkait di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	45,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemangangan Ekstels Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembiayaan Perawatan dan Kestuan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	202,704,900	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemangangan Ekstels Daerah	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pemngan di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0003	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	59,999,700	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Facilitas Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,999,240	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Nitelir Realisasi Kinerja SPO	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,300,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,802,710,778	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penertanahan dan Pengaturan Verifikasi Keuangan SPO	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,994,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pondasi dan Penghalangan Administrasi Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	70,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,994,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29,996,403	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	26,991,150	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	159,997,360	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratua	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.							

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE RPMD	NAMA RPMD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.01.0.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	312,020,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,082,140	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	30,964,915	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.01	KECAMATAN	7.01.01.01.2.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintah Daerah	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,936,653	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	74,998,800	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perengkap Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	12,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	898,435,334	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	75,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	250,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Maratus	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	54,187,485	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02.0001	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (URUSAN MILIK & KEKAWAHLAN)	7.01.02.2.02.0001	Pencananaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat @ Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02.0002	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (URUSAN MILIK & KEKAWAHLAN)	7.01.02.2.02.0002	Facilitas Pencapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,999,380	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terhbat dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	295,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	554,995,531	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KODIBODINAS KETETRAMAMAN DAN KETERTIHAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Tertitik di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	39,992,490	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemanggun Kognisi Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Perlatan dan Kebutuhan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	175,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.01.05.2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemanggun Kognisi Daerah	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan @ Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Facilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	258,019,705	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Facilitas Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,999,075	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	79,999,205	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mitnor Realisasi Kinerja RPMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,999,655	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Pencananaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,189,726	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,032,305,934	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.01	KECAMATAN	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Administrasi Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	84,295,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah RPMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,987,555	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kependagangian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kehidupannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	35,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kependagangian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	70,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,496,480	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perengkap Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44,495,520	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,376,270	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	114,892,300	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,299,550	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratran Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	80,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.01	KECAMATAN	7.01.01.2.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29,870,707	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29,717,655	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungur Urusan Pemertintah Daerah	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	34,794,874	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	3,500,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungur Urusan Pemertintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	27,970,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA</								

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE RPMD	NAMA RPMD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Tabalar	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.1.2.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.00.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Sarana Pendukung	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		95,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		30,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibebankan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibebankan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		19,999,200
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibebankan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditambah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		30,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		19,999,620
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Subsidesi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Disalurkan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		384,997,160
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		149,999,661
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		20,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.01.05.2.01	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dibebankan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Peraturan dan Keastuan Bangsa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		174,999,995
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		9,999,908
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		94,998,700
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		50,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		30,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemantapan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		99,999,991
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja RPMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		50,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		130,195,950
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,443,791,851
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		323,252,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kependidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		42,780,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0011	Biayadana Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		50,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,498,264
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		79,995,187
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,492,602
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		99,992,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		5,499,650
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peruntuk Perundang-undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		3,500,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		29,999,970
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPMD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		65,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		48,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		24,997,785
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		1,200,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		29,999,800
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		25,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		114,998,600
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Batu Putih	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		89,999,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Biatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Biatan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		15,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Biatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Biatan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002	Subsidesi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Disalurkan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		373,000,000
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Biatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Biatan	7.01	KECAMATAN	7.01.03	PROGRAM PEMBIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		189,943,776
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Biatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Biatan	7.01	KECAMATAN	7.01.04	PROGRAM KORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		49,975,520
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0															

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SFPD	NAMA SFPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	RINCIAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0006	Facilitas Pelaksanaan Pemeliharaan Kepala Desa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,971,565	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01	Facilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	7.01.06.2.01.0011	Facilitas Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	14,992,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,850,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,940,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,777,432,944	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	90,428,880	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	18,750,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	5,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	119,846,541	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,987,830	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,978,113	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,999,300	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komultasi SFPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	40,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	46,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	98,441,069	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	994,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	59,996,750	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	10,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	356,800,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	125,000,000	
###	2025	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Blatan	7.01	KECAMATAN	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44,935,000	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAJILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	442,783,612	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAJILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembangunan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,999,848	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAJILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0007	Pemantauan terhadap aktivitas kepahlawanan dan Purnapahlawana	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	199,999,055	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAJILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0008	Pemberlakuan Pahlawana	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,492,973,376	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAJILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0009	Pembiayaan lanjutan kepada Purnapahlawana Duta Pancasila	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAJILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapahlawana Duta Pancasila	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCAJILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapahlawana Duta Pancasila	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,997,000	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENGINGATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	124,999,662	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENGINGATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,349,999,647	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENGINGATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	250,000,000	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03	PROGRAM PENGINGATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	149,500,594	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04	PROGRAM REMEDIASI DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Anak di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	262,400,000	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04	PROGRAM REMEDIASI DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Anak di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	94,997,010	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Bencana, Fasilitas Ketahanan Umum Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,457,400,000	
###	2025	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESETUJUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Bencana, Fasilitas Ketahanan Umum Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	149,999,680	

NO	TAHUN	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE SPTD	NAMA SPTD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	KODE SUMBER DANA	NAMA SUMBER DANA	BENCAN	LABEL SUB KEGIATAN
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Ciri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbuatan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	300,000,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Ciri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbuatan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	750,000,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Ciri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbuatan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	938,000,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Ciri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbuatan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,250,000,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	841,120,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,310,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Initiator Realisasi Kinerja SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,448,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	130,196,080	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,209,948,647	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	149,770,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengadaan Barang/ Jasa	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	51,983,134	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	55,200,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kependidikan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0011	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	50,000,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.01.01.2.06.0001		1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	4,850,200	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.06.0002	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,997,045	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.06.0004	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	44,965,300	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.06.0005	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Pengadaan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	9,996,170	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.06.0006	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang Undangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	7,500,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.06.0009	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0009	Pemeliharaan Rapor Koordinasi dan Komutasi SKPD	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	200,000,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	492,000,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1,778,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	99,993,400	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	415,050,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	81,200,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perlalatan dan Mesin Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	33,300,000	
###	2025	0	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan Jasa/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	29,647,500	
																			5,252,899,000,000